



## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM KARAWANG ZERO NEW STUNTING 2024 DI KABUPATEN KARAWANG (STUDI KASUS KECAMATAN KLARI)**

**Zeanetha Aulia Azzahra<sup>1)</sup>, Arlan Siddha<sup>2)</sup>, Tinda Irawaty<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Program Karawang *zero new Stunting* 2024 dengan studi kasus Kecamatan Klari. Ada berbagai masalah dalam Penelitian ini yaitu masih ada permasalahan *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 salah satunya masih adanya ego sektoral antara organisasi perangkat daerah beserta pelaku *pentahelix* dalam suatu kolaborasi dan angka *stunting* di kecamatan Klari termasuk tertinggi di Kabupaten Karawang. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *Collaborative governance* dalam Mewujudkan Program Karawang *Zero new stunting* di Kabupaten Karawang. Teori yang digunakan Oleh peneliti yaitu Teori Emmerson yang meliputi Dinamika kolaborasi, Tindakan-tindakan kolaborasi, Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, studi lapangan, dokumentasi dan wawancara kepada 10 informan. Hasil penelitian *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 di Kab. Karawang menunjukkan kolaborasi yang terjadi belum berjalan dengan maksimal karena ditandai dengan dinamika kolaborasi masih adanya ego sektoral. Tindakan-tindakan kolaborasi yang tidak merata ke semua kecamatan yang ada di Karawang serta dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi masih terjadi kenaikan jumlah angka *stunting* di Karawang.

**Kata Kunci:** *Collaborative governance, Pentahelix, Stunting*

### **Abstract**

*This research was conducted to determine the extent of the implementation of the collaborative governance process in realizing the Karawang zero new Stunting 2024 Program with a case study of Klari District. There are various problems in this research, namely that there are still collaborative governance problems in*

*realizing the Karawang zero new stunting 2024 program, one of which is that there is still a sectoral ego between regional apparatus organizations and pentahelix actors in a collaboration and the stunting rate in Klari sub-district is among the highest in Karawang Regency. The purpose of this research is to find out how Collaborative governance in realizing the Karawang Zero new stunting program in Karawang Regency. The theory used by researchers is the Emmerson Theory which includes the dynamics of collaboration, collaborative actions, temporary impact and temporary adaptation of the collaboration process. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out through observation, literature studies, field studies, documentation and interviews with 10 informants. The results of collaborative governance research in realizing the Karawang zero new stunting 2024 program in Karawang Regency show that the collaboration that occurs has not run optimally because it is marked by the dynamics of collaboration that still have sectoral egos. Collaborative actions that are not evenly distributed to all sub-districts in Karawang and the temporary impact and temporary adaptation of the collaboration process still increase the number of stunting rates in Karawang.*

**Keywords:** Collaborative governance, Pentahelix

## **PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka permasalahan *stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) atau keadaan di mana kekurangan gizi atau kelebihan gizi pada waktu yang bersamaan sehingga memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Masalah *stunting* merupakan salah satu permasalahan kompleks yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam hal Percepatan penurunan *Stunting* dalam program prioritas Pemerintah sebagaimana termasuk dalam RPJMN 2020-2024. Target *Stunting* di Indonesia pada tahun 2024 yakni prevalensi *stunting* turun hingga 14%.

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) (dalam Ipan, 2021: 384) di tahun 2019 mengungkapkan penurunan *Stunting* hanya 0,9 persen

saja dari tahun 2017 sebanyak 22,2 atau sekitar 150,8 juta menjadi

21,3 sekitar 144 juta di tahun 2019 yang masih mengalami kasus *stunting*. Berdasarkan data yang sama Indonesia menempati posisi ke-2 dengan kasus *stunting* terbanyak di wilayah Asia Tenggara, dan menempati posisi ke-5 dengan kasus *stunting* terbanyak di dunia. Tentunya hal itu sangat mengkhawatirkan bagi masa depan anak bangsa Indonesia.

Permasalahan *Stunting* ini sangat serius mengingat anak sudah mengalami gagal tumbuh yang akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif yang secara nasional akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa. Penelitian di berbagai negara berkembang menerangkan bahwa *stunting* memiliki banyak dampak buruk pada masa depan anak-anak.

Fenomena dari *stunting* sangat besar karena dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, penurunan daya tahan tubuh, dan keterlambatan perkembangan kognitif. *stunting* juga dapat memengaruhi produktivitas di masa dewasa dan berkontribusi pada kemiskinan generasi berikutnya. Permasalahan *stunting* tidak dapat di nomor duakan karena mengingat dampak yang akan diterima dari permasalahan *stunting* cukup fatal sehingga pemerintah harus mengatasisebelum terjadi kasus *stunting*. Oleh karena itu, *stunting* menjadi hal penting yang harus terus di dorong oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* dan Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka *stunting* Indonesia tahun 2021-

2024.

Kebijakan tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai peraturan khusus terkait penanganan *stunting* yaitu Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Penanganan *Stunting* dan Keputusan Bupati Karawang Nomor 147/Kep.184-Huk/2022 tanggal 28 Februari 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karawang. Peraturan di Kabupaten Karawang merupakan kunci dalam pelaksanaan *stunting*, Karawang salah satu kabupaten yang menjadi lokasi intervensi penanganan *stunting* sejak tahun 2018 hal ini disebabkan angka *Stunting* di Kabupaten Karawang mencapai 33,1%.

Tabel 1.1 Pesentasi Stunting Di Kabupaten Karawang

Tahun	Presentase Stunting
2018	33,11%
2019	24,01%
2021	20,60%
2022	14,00%
2023	17,10%

Dari data dinas kesehatan Karawang, Kasus *stunting* di Kabupaten Karawang memang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti tahun 2021 yaitu sebesar 20,6 dan tahun 2022 sebesar 14%, tetapi pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 17,10% angka ini masih relatif besar karena target *stunting* di Kab. Karawang tahun 2024 yaitu *zero new stunting* oleh karena itu pemerintah Kab. Karawang tetap terus melakukan target agar *stunting* tidak terjadi kenaikan.

Berdasarkan data yang didapatkan, pada bulan April 2024 kasus

*stunting* di Kab. Karawang mencapai 2.978 anak kasus *stunting* diwilayah Karawang itu tersebar di hampir seluruh kecamatan Karawang. Namun kasus *stunting* tertinggi berada di kecamatan Klari sebanyak 296 anak. Seharusnya target di 2023 yaitu 8% dan tahun 2024 *Zero stunting* tetapi di tahun 2022 masih 14%. Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah *stunting* di beberapa wilayah seperti Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Rengasdengklok yang masih relatif tinggi. Salah satu kecamatan di Kab. Karawang yaitu di Kecamatan Klari masih relatif tinggi dengan angka kasus *stunting* 296 hal ini menjadi fokus untuk diteliti karena jumlah angka *stunting* terbanyak ada pada Kecamatan Klari karena idealnya suatu program yang sudah tercapai maka seharusnya angka *stunting* turun tetapi pada realitasnya masih relatif tinggi. Sehingga peneliti ingin mengetahui keseriusan pemerintah daerah Kab. Karawang khususnya di Kecamatan Klari dalam mewujudkan program *Zero new stunting 2024* melalui *Collaborative governance*.

Permasalahan yang terjadi dari hasil observasi, peneliti melihat masih adanya patologi koordinasi atau miskordinasi antara pemerintah beserta pemangku kepentingan serta masih adanya ego sektoral, kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya manusia yang memadai karena masih kekurangan tenaga kesehatan di tengah misi berat mengejar program Karawang *zero new stunting*, masih belum maksimal dalam segi administrasi atau pemberian arahan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahaman masyarakat. Sehingga, hal itu perlu ditingkatkan dalam suatu kolaborasi *pentahelix* agar bisa mendukung suatu program yang dicanangkan.

Dalam upaya mewujudkan Karawang *Zero new stunting* untuk mencegah permasalahan tumbuh kembang anak di Kabupaten

Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang telah memberdayakan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan Karawang sebagai intervensi dari *stunting* sedangkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai penggerak dalam hal Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dinyatakan pada Keputusan Bupati Karawang Nomor 147/Kep.184–Huk/2022 tanggal 28 Februari 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karawang. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penelitian ini nantinya akan berfokus pada masalah proses kolaborasi dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 yang selama ini berjalan dengan menggunakan teori *collaborative governance* Menurut Emerson & Nabatchi (2015) mengemukakan:

*“We define collaborative governance broadly as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished”.*

Bahwa tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* secara luas sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan masyarakat secara konstruktif di seluruh lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik, jika dikerjakan oleh satu pihak saja maka tujuan tersebut tidak dapat dicapai.

Indikator dari konsep proses *Collaborative governance* Menurut Emerson yang terdiri dari dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses

kolaborasi mengenai sejauhmana *collaborative governance* antara pemerintah dan aktor *pentahelix* dalam mewujudkan program pemerintah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2023 : 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 dengan studi kasus kecamatan Kkari.

Adapun Instrumen penelitian kualititaif dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dengan teknis pedoman wawancara, foto dan rekaman suara. Dalam penentuan informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu kepala bidang kesehatan masyarakat di dinas kesehatan kab Karawang, kepala bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kab Karawang, camat Klari, tim percepatan penanganan *stunting*, pihak swasta, masyarakat, akademisi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi literatur dengan sumber dari buku jurnal, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis sebelum dilapangan, analisis data selama di lapangan, analisis data setelah di lapangan.

Adapun untuk tempat penelitian dilakukan diwilayah Kecamatan Klari. Hal itu sesuai dengan studi kasus penelitian yang dipilih

peneliti.

## **PEMBAHASAN**

*Collaborative governance* merupakan suatu proses di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat umum, bekerja sama dalam membuat dan mewujudkan suatu program yang diharapkan. Proses kolaborasi merupakan bagian dari suatu *collaborative governance*. Dalam suatu *collaborative governance*, proses kolaborasi merupakan suatu inti dari pelaksanaan model *collaborative governance*. Proses kolaborasi senantiasa digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan mengenai fase-fase program kolaborasi Pendekatan ini menekankan pada teori menurut (Emerson et al., 2012) yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi tujuan mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

### 1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam mewujudkan program Karawang *Zero new stunting* 2024 di Kabupaten Karawang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, media dan masyarakat umum. Mereka bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan memonitor program tersebut melalui pertukaran ide, sumber daya, dan upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dinamika kolaborasi dalam mewujudkan program Karawang *Zero new stunting* 2024 di Kabupaten Karawang yaitu melibatkan berbagai pihak dan langkah inovatif. Program ini dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karawang, yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat



daerah (OPD) yang bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal dinamika kolaborasi pemerintahan peneliti melihat sudah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak swasta, media maupun akademisi tetapi dalam suatu dinamika kolaborasi di pemerintah Kabupaten Karawang masih adanya ego sektoral yang masih terjadi di antara OPD yang terkait

Dinamika kolaborasi dalam terbentuknya suatu proses kolaborasi dalam upaya mewujudkan program Karawang *zero new stunting* di Kabupaten Karawang di latarbelakangi oleh kesadaran dan keterbatasan pemerintah dalam upaya pemenuhan pelayanan publik yang prima karena apabila hanya pemerintah saja yang bergerak kecil kemungkinan suatu program akan lama terwujudnya. Pemerintah Kabupaten Karawang menyadari akan kompleksitas persoalan yang ada, utamanya kompleksitas persoalan *stunting* tersebut.

Bahwasannya dinamika kolaborasi untuk mewujudkan program Karawang *Zero new stunting 2024* ini melibatkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Seperti pentingnya Koordinasi antara OPD-OPD terkait serta *pentahelix* dalam kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, akademisi, swasta, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang sudah dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah daerah sebagai peran pengarah utama, sementara media, swasta dan akademisi membantu pemerintah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan program *zero new stunting* ini.

Kolaborasi pemerintah daerah Karawang dengan pihak swasta sudah melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan banyak perusahaan yang sudah membantu untuk penurunan *stunting* contohnya kerjasama dengan PT Nestle menurunkan CSR di 2 lokus

yaitu di kecamatan Klari dan Karawang barat, selain itu perusahaan PERURI, ASTRA, APINDO, *Human Initiative* bergabung untuk mewujudkan *zero new stunting*.

Selain itu juga kolaborasi pemerintah Kabupaten Karawang dengan akademisi bekerja sama dengan Universitas Singa Perbangsa dengan melibatkan ahli gizi untuk suatu kegiatan AKS (Audit Kasus *Stunting*). Pemerintah Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Universitas Singa Perbangsa Karawang karena fakultas ilmu gizi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkolaborasi terkait kegiatan DEBEST yaitu desa bebas *stunting* karena kegiatan tersebut perlu adanya pendampingan dari pihak dari akademisi.

## 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi adalah saat dua atau lebih individu atau entitas bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah yang kompleks. Kolaborasi sering kali melibatkan komunikasi yang efektif, koordinasi tugas, dan pembagian tanggung jawab. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam tim kerja, antar departemen dalam sebuah organisasi. Sebelum melakukan tindakan kolaborasi bersama *pentahelix*, pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pertemuan dan koordinasi bersama agar sesuai dengan tupoksi yang dimiliki pelaku *pentahelix*.

Tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu menginisiasi dan mengkoordinasi program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi tingkat *stunting*, menyediakan dana dan sumber daya untuk program-program tersebut, termasuk pendanaan untuk penyuluhan gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemberian makanan tambahan,

melaksanakan kegiatan 8 Aksi Konvergensi *stunting* salah satunya yaitu rembuk *stunting*, melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan *stunting* dan membuat kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*, seperti meningkatkan akses terhadap gizi yang berkualitas, memperkuat sistem pemantauan gizi, dan memberikan insentif bagi perusahaan makanan untuk memproduksi makanan yang bergizi. Tindakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kolaborasi dengan *pentahelix* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 yaitu:

- Kegiatan Pemberian Makanan Pangan Lokal (PMT-Lokal) dengan menu gizi seimbang yakni nasi, lauk pauk, sayuran dan buah ataupun susu
- DEBEST (Desa Bebas *Stunting*) Desa bebas *stunting* sudah dilaksanakan dan bekerja sama dengan pihak swasta yaitu *human initiative* dengan lokus 8 desadi kecamatan Klari. Kegiatan kolaborasi antara pemerintah kecamatan Klari dengan pihak swasta yaitu dengan bantuan berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemeberdayaan masyarakat dan kegiatan *coocking class*.
- Pendampingan kepada sasaran keluarga risiko *stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitasi, pelayanan rujukan serta fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan mendeteksi dini faktor risiko *stunting*.
- Starkom *Stunting*  
Tindakan tindakan Strategi dalam komunikasi untuk perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* melalui 7 Gerakan Cegah *stunting*  
A- B-C-D-E-F-G yaitu  
A : Aktif minum tablet tambah darah yang sasaarannya pada ibu hamil dan remaja puteri  
B : Bumil periksa kesehatan minimal 6 kali  
C: Cukupi protein hewani setiap hari

D: Datang ke posyandu setiap bulan  
E : Eksklusif asi selama 6 bulan

F: Fungsikan jamban sehat

G : Galakan cuci tangan pakai sabun

- Tindakan SADARI (Sasaran *Stunting* Diberi Dua Telur Satu Hari)  
Sasaran *stunting* yakni balita *stunting* diberikan bantuan pangan berupa telur(2 telur 1 hari selama 6 bulan) di setiap kecamatan.

Selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten Karawang memiliki Digitalisasi Data *Stunting* yang tersedia aplikasi SORABI serta TANGKAS, aplikasi untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta Cegah *Stunting*.

Dalam suatu kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan *pentahelix* tentunya masyarakat sebagai subjek dalam mewujudkan program Karawang *zeronew stunting* harus terus berkontribusi dan ikut andil dalam kegiatan- kegiatan yang diadakan pemerintah dengan *pentahelix* agar masyarakat juga ikut merasakan hasil dari tindakan yang dilakukan pemerintah.

### 3. Dampak Sementara Serta Adaptasi Sementara Dari Proses Kolaborasi

Kolaborasi antara pemerintah dan *pentahelix* dalam mewujudkan program penanganan *stunting* membawa dampak sementara yang signifikan serta memerlukan adaptasi sementara dari berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi antara pemerintah dan *pentahelix* (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media) dalam mewujudkan program *Zero new stunting* telah menunjukkan beberapa dampak sementara dalam proses kolaborasi pemerintah. Dampak sementara dari kolaborasi pemerintah kecamatan Klari dengan aktor terlibat dalam proses kolaborasi untuk mewujudkan program *stunting* ini tentunya

memiliki dampak terhadap masyarakat maupun aktor yang terlibat di kecamatan Klari. Hasil dari studi lapangan bahwasanya dampaknya apabila semua *pentahelix* benar benar berjalan kolaborasinya ini harapannya khususnya di Kecamatan Klari angka *stunting* bisa berkurang.

Pemerintah kecamatan Klari sudah melakukan berbagai adaptasi dalam suatu kolaborasi, semua *pentahelix* saling mendukung dalam penanganan *stunting*. Dalam SK TPPS yang di ketua oleh camat dan beranggotakan *stakeholder* yang ada di kecamatan Klari dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertera dalam surat keputusan tersebut. Pemerintah kecamatan Klari sudah bergerak, pemerintah kecamatan Klari sudah melakukan berbagai sosialisasi dan masalahnya setelah sosialisasi masyarakatnya belum tentu paham karena pemerintah kecamatan Klari ini tidak bisa 1x24 jam memantau masyarakat dan apabila makanan yang diberikan oleh pemerintah secara rutin kepada bayi dapat tercapai dalam waktu 3-6 bulan.

Berdasarkan data yang didapatkan Pada awal april 2024 di kecamatan Klari mencapai 296 sehingga mengalami kenaikan dibanding dengan data pada bulan Agustus 2023. Hasil analisis dan studi lapangan bahwa dampak sementara apabila pemerintah kecamatan Klari dan *pentahelix* benar benar berjalan kolaborasinya ini yaitu *pentahelix*nya harapannya khususnya di kecamatan Klari angkanya bisa turun tetapi apabila di bandingkan dengan kecamatan kecamatan kecil memang Klari susah untuk menurunkan angka tersebut, karena kecamatan Klari merupakan kecamatan raksasa dengan jumlah 13 desa dengan jumlah total penduduknya 200,8 rb sehingga seturun turunnya angka *stunting* di kecamatan Klari tidak akan sama dengan kecamatan kecil. Dengan demikian harapan angka *stunting* di kecamatan Klari ini

bisa menurun. Dampak sementara dari kolaborasi antara pemerintah dan *pentahelix* dalam mewujudkan program penanganan *stunting*, serta adaptasi yang diperlukan dari berbagai pihak yang terlibat. Peningkatan dalam kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Karawang dan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, media, dan sektor swasta.

Komunikasi yang lebih baik memungkinkan adanya sinergi dalam kegiatan seperti pembuatan pemodelan *pentahelix*, musyawarah mengenai lokus *stunting*, dan pemberdayaan melalui KKN tematik. Hal ini menunjukkan langkah positif dalam mencapai tujuan bersama untuk mengatasi *stunting*.

Kolaborasi dengan *pentahelix* berhasil menunjukkan penurunan angka prevalensi *stunting* dari 20,6% menjadi 14% di tahun 2022. Tetapi angka *stunting* di Karawang pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 17,1%. Ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Masyarakat merasakan perubahan positif sejak program ini diterapkan, seperti peningkatan pemeriksaan kesehatan dan asupan gizi yang lebih baik bagi anak-anak. Program edukasi juga membantu para ibu memahami pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak. Namun, masih ada tantangan seperti kasus anak yang tidak mengalami peningkatan berat badan meskipun mendapat perhatian di posyandu.

Meskipun terjadi berbagai upaya kolaborasi antara pemerintah kecamatan Klari dan *pentahelix*, angka *stunting* di wilayah ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam menjangkau semua masyarakat secara efektif, terutama di wilayah yang memiliki jumlah penduduk dan desa yang besar seperti Klari. Sehingga penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan program berdasarkan data dan penelitian

yang solid. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media, serta melibatkan semua pihak terkait, diharapkan program penanganan *stunting* dapat terus diperbaiki untuk mencapai target Karawang *Zero new stunting* 2024 di Karawang. Kolaborasi antara pemerintah dan *pentahelix* telah memberikan dampak sementara yang signifikan dalam upaya penanganan *stunting*, namun masih diperlukan adaptasi dan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan uraian di atas. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

*Collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi pendekatan utama dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan program yang efektif dalam menangani *stunting* dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kolaborasi dengan *pentahelix*, pemerintah daerah Karawang telah membuat regulasi, melibatkan masyarakat, swasta, media, dan akademisi dalam upaya penurunan *stunting*. Meskipun terjadi kenaikan angka *stunting* pada tahun tertentu, upaya kolaboratif terus diperkuat untuk menjadikan penurunan *stunting* sebagai prioritas di tahun-tahun berikutnya

### 1. Dinamika Kolaborasi

Dilihat dari dinamika kolaborasi *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting* 2024 sebagai siklus interaksi peneliti melihat dalam dinamika kolaborasi ini

sudah berjalan baik, meski masih terdapat tantangan ego sektoral antar instansi. Namun, upaya bersama dari pemerintah daerah Karawang, camat Klari, dan OPD lainnya memastikan program ini tetap berada di jalur yang tepat. Kolaborasi dengan media, pihak swasta, dan akademisi juga berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, dinamika kolaborasi ini sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak dan perlu koordinasi yang lebih terintegrasi serta komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam program *zero stunting* ini.

## 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Dilihat dari tindakan-tindakan kolaborasi *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting 2024* peneliti melihat kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam model *Pentahelix* di Kabupaten Karawang menunjukkan pentingnya sinergi antar sektor untuk menangani masalah kesehatan masyarakat terutama kesehatan anak-anak yang kompleks seperti *stunting*. Pemerintah daerah Karawang maupun kecamatan Klari sudah melakukan berbagai tindakan kolaborasi yang terintegrasi dengan membentuk skema *pentahelix*. Dengan kontribusi masing-masing pihak, program Karawang *Zero new stunting 2024* diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Karawang.

## 3. Dampak Sementara serta Adaptasi Sementara dari Proses Kolaborasi

Dilihat dari dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses *collaborative governance* dalam mewujudkan program Karawang *zero new stunting 2024* peneliti melihat kolaborasi antara pemerintah dan pihak yang terlibat seperti camat, TPPS, akademisi, swasta, masyarakat, dan media dalam program penanganan *stunting* di Karawang telah menunjukkan dampak



sementara yang signifikan. Peneliti melihat hasil kolaborasi ini mencakup perbaikan komunikasi antar sektor, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai gizi, serta banyak pihak yang ikut berkolaborasi dalam program *stunting* ini. Pemerintah Kabupaten Karawang, bersama akademisi, sektor swasta, dan media, telah melakukan berbagai adaptasi seperti memperbaiki status gizi anak-anak melalui berbagai program edukasi, pemberian makanan tambahan yang bergizi maupun *cooking class*.

Peneliti juga melihat adaptasi sementara seperti penyesuaian strategi komunikasi dan kolaborasi dengan sektor swasta telah membantu meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan program *zero stunting* ini. Keberhasilan sementara ini menunjukkan potensi besar untuk mencapai target *Zero new stunting 2024* di Karawang dengan kerja sama yang baik dan adaptasi yang tepat. Evaluasi berkelanjutan dan pendekatan berbasis data akan menjadi kunci untuk memperbaiki program ini lebih lanjut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, N. M., Sudartini, S., Anomsari, T. E., & Novira, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance* (S. Anwar, Ed.). Deepublish.
- Ansel, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Donahue, J., & Zeckhauser, R. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals in Turbulent Time*. Princeton University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes* (N. Putens, Ed.; ISBN : 978-1-62616-254-9). Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative

Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 22(1), 1–29.

Ipan. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Jurnal FEB Unmul*, 18(3), 383–391.

<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

Rahayu, A. Y. S. (2020). *Pelayanan Publik dan E-Government : Sebuah Teori dan Konsep* (S. Y. Hayati, Ed.; 1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian* (S. Y. Suryandari, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta.

Kemenkes. (2023). *Stunting*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dokumen :

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024  
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*.

Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka *stunting* Indonesia tahun 2021-2024.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Penanganan *Stunting*

Keputusan Bupati Karawang Nomor 147/Kep.184–Huk/2022 tanggal 28 Februari 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karawang

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 12



